

INTRODUCTION TO MALARI : DARI SITUASI, AKSI, HINGGA RUSUH PADA AWAL ORDE BARU 1970 – 1974

Aditia Muara Padiatra

Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

Email: aditiamuara@gmail.com

Abstrak: Pada tanggal 14 Januari kerusuhan pertama terjadi pada awal Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode historis sebagai metode penelitian, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan penyebab dan efek dari kerusuhan tersebut. Kronologi kerusuhan ini, yang bernama Malari dipicu oleh serangkaian protes yang dilakukan oleh pihak oposisi dan mahasiswa terhadap modal asing, yang dalam hal ini adalah kasus dimiliki dan wabah Jepang mengenai penipuan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di masa Orde Baru. Berdasarkan kesaksian tokoh-tokoh sejarah yang ada pada saat itu, semua itu akhirnya menjadi benang merah yang membentuk interpretasi dari suatu peristiwa dalam sejarah negeri ini.

Kata Kunci: Malari, Kerusuhan, Orde Baru

PENDAHULUAN

Peristiwa Malapetaka 15 (Lima Belas) Januari atau yang lebih dikenal dengan peristiwa malari adalah kerusuhan pertama yang menandai awal sejarah dari Orde Baru. Kerusuhan tersebut klimaks dari serangkaian peristiwa yang bersumber dari penentangan dan protes mahasiswa terhadap modal asing, yang dalam hal ini adalah Jepang dan merebaknya kasus-kasus penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh para pembesar dan petinggi pada masa Orde Baru. Hal yang kemudian menarik adalah bahwa kesemuanya ini berakar pada sebuah situasi awal dimana format politik dari pemerintahan Orde Baru yang baru terbentuk, kemudian menjadikan sebuah kuasa baru yang diiringi pula oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir oknum yang kala itu sedang berkuasa. Hal inilah yang kemudian memicu aksi-aksi mahasiswa yang terjadi pada sekitar peristiwa penentangan modal asing yang kemudian berujung pada Malari ditahun 1974.

Meruntut kepada hal tersebut, adalah sesuatu yang baik untuk dapat melihat bagaimana pola pola kronologi yang terjadi mulai dari awal latar belakang, sampai dengan

akhir, atau pasca peristiwa malari terjadi agar mendapatkan gambaran yang utuh terhadap peristiwa tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa setelah peristiwa malari tersebut usai, efek yang ditimbulkannya cukup besar berdampak dalam kehidupan pada masa Orde Baru, khususnya terhadap format politik yang telah ada dan berjalan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Dinamika Awal dan Format Baru Politik Indonesia

Dalam khazanah sejarah tanah air, masa awal Orde Baru adalah salah satu masa penting yang layak untuk kita telaah. Diawali oleh sebuah pergeseran kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto, hal ini mengakibatkan munculnya momentum untuk pergantian kekuasaan yang ada di Indonesia yang pada saat itu bertepatan dengan momentum dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno yang dilimpahkan kepada Jenderal Soeharto.

Hal ini menjadikan Jenderal Soeharto memperoleh kekuasaan penuh untuk mengambil segala tindakan yang dianggap

perlu guna menegakkan ketertiban dan keamanan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kudeta yang dilakukan oleh PKI yang lebih dikenal dengan kudeta G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 tersebut. Pada saat itu, Jenderal Soeharto segera melaksanakan beberapa instruksi, yang salah satunya ialah melarang dan menertibkan PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi didalamnya, dan lembaga politik masyarakat terutama Dewan Perwakilan Rakyat dan politik luar negeri.

Peralihan dari Soekarno ke Soeharto dilakukan secara bertahap. Proses ini berlangsung antara hari-hari pertama bulan Oktober 1965 sampai 12 maret 1967, saat secara resmi Soeharto menggantikan Soekarno dan menjadi pejabat Presiden. Hal tersebut dilakukan karena di dalam tubuh militer sendiri masih banyak kelompok yang mendukung Soekarno. Jenderal Soeharto, walaupun tampaknya memegang kekuasaan sejak Oktober 1965, harus memperhitungkan kekuatan para pendukung Soekarno yang masih banyak terdapat dikalangan sipil dan militer, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu Soeharto juga berhati-hati untuk tidak menonjolkan kekuatan militer yang otoriter, dalam arti, Ia tidak ingin melakukan konflik fisik yang frontal dan besar-besaran untuk menyingkirkan unsur-unsur pendukung Soekarno dalam militer. Ia lebih memilih untuk menggunakan prinsip “ *alon-alon asal kelakon* “ (biar lambat asal tujuan terlaksana) untuk secara perlahan memperkuat kedudukannya dikalangan militer.

Terbentuknya Orde Baru pada akhirnya direalisasikan dengan keputusan dalam sidang istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967, yang menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada bulan maret 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai presiden penuh. Pengukuhan yang pada akhirnya melengserkan presiden Soekarno dan mengakhiri kekuasaannya di Indonesia

tersebut, dipakai sebagai indikator dimulainya rezim Orde Baru.

Setelah dikukuhkan dan resmi menjadi presiden penuh Republik Indonesia, Jenderal Soeharto kemudian dihadapkan oleh beberapa persoalan penting yang pada saat itu menghinggapai masyarakat Indonesia, terutama stabilitas yang begitu rapuh warisan setelah runtuhnya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Ia dihadapkan sebuah pertanyaan besar bagaimana membuat suatu usaha format politik baru yang tentunya akan menjadi sebuah mekanisme yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia yang stabil dan sejahtera.

Format politik baru itu disatu sisi harus mampu memberikan kepuasan kepada unsur-unsur pendukung Orde Baru yang pada saat itu tentu saja sangat beraneka ragam, dan disisi lain juga harus mampu melihat sejarah, dengan menjauh dari kesulitan-kesulitan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Semua itu tidak dipungkiri menjadi titik tolak atau indikator untuk menciptakan sebuah kondisi yang mampu menghasilkan ketenangan dan kestabilan didalam masyarakat.

Setelah Orde Baru terbentuk, sistem politik yang berkembang pada saat itu bergeser kesuatu situasi politik yang bertolak belakang dengan situasi politik sebelumnya, yaitu dari suatu kondisi yang cenderung ketat atau otoriter beralih ke arah yang lebih bebas. Hal itu terlihat dari kebebasan yang dialami oleh setiap organisasi dan pers dalam menyuarakan aspirasinya mengenai kenyataan yang hidup di masyarakat secara luas dan tuntas. Dalam bidang politik luar negeri, pemerintah Orde Baru juga melakukan perubahan, seperti diakhirinya konfrontasi dengan Malaysia, menjalin hubungan kembali dengan negara-negara Barat (Inggris dan Amerika Serikat), dan masuknya kembali Indonesia menjadi anggota PBB. Konsepsi politik Jenderal Soeharto pada saat itu tampak jelas berusaha memperbaiki dan

menghilangkan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada masa sebelumnya (masa Demokrasi Terpimpin). Donald Hindley dalam artikelnya menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang nampak mendukung pada saat Jenderal Soeharto menjalankan kekuasaannya tersebut:

“ ... Dalam istilah yang luas, kekuasaan Jenderal Soeharto berdiri pada setidaknya enam faktor. Pertama, kontrolnya terhadap angkatan bersenjata, yang terus meningkat sejak peristiwa Oktober 1965. Kedua, pembubaran fisik PKI, Partai Komunis Indonesia, yang selesai pada tahun 1968. Ketiga, kadar ketaatan birokrasi sipil yang mulai menyeluruh. Keempat, kekacauan-kekacauan internal yang ada di banyak partai politik. Kelima, kepatuhan tradisional dari banyak golongan kelas bawah. Dan keenam, kesuksesan pemerintah dalam bidang ekonomi ... ”

Soeharto berusaha untuk membentuk sebuah format politik baru yang kokoh dibawah kepemimpinannya, dengan semakin menguatkan posisi militer dan teknokrat sebagai landasan kekuatan utamanya. Di sisi lain, usaha yang dilakukan oleh Soeharto sebagai presiden masa Orde Baru dalam menciptakan suatu stabilitas di bidang politik dan keamanan guna menunjang perkembangan dari bidang lainnya (ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain) juga terlihat besar.

Untuk memantapkan kekuatannya dibidang politik, Ia berusaha mengembangkan sebuah kekuatan eksekutif yang kuat, yaitu dengan merangkul pendukung terbesarnya, yakni militer dan golongan menengah (yang

didalamnya termasuk mahasiswa KAMI pendukung rezim Orde Baru) dalam suatu sekretariat bersama, yang menjadi awalan dari suatu partai yang nantinya akan sangat mendominasi pada masa Orde Baru, yaitu Golongan Karya (Golkar).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Soeharto, bersama dengan militer dan Golkar terbukti ketangguhannya pada saat diselenggarakannya pemilihan umum tahun 1971. Suatu kerja keras dan usaha untuk menjadikan Golkar sebagai sebuah organisasi politik yang kuat pada akhirnya menghasilkan sebuah awalan yang luar biasa. Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1971 tersebut Golkar sukses dengan gemilang, yaitu memperoleh sekitar 236 dari 360 kursi yang diperebutkan. Keberhasilan Golkar dalam pemilu 1971 membuktikan bahwa usaha keras Presiden Soeharto dalam menciptakan dan memantapkan stabilitas dibidang politik dapat tercapai. Adanya dua kekuatan, dalam hal ini adalah militer dan Golkar yang dapat dijadikan andalan dalam pemerintahan eksekutif, maka langkah selanjutnya adalah berusaha menghilangkan segala gangguan dan rintangan yang dapat menjadi kendala suksesnya format politik baru tersebut dalam bidang politik.

Salah satu kendala yang dianggap cukup serius adalah dalam menghadapi partai-partai politik yang pada saat itu kurang lebih ada sepuluh. Hal tersebut sering memicu timbulnya konflik internal dan krisis, perpecahan ataupun perebutan kekuasaan didalam tubuh partai politik. Sehingga peranan dan fungsi mereka dalam memantapkan stabilitas politik yang sedang dibangun oleh pemerintah Orde Baru semakin lemah. Maka langkah terbaik yang diambil oleh Pemerintah Soeharto pada saat itu adalah menyederhanakan sistem kepartaian yang ada. Sidang umum MPR bulan Maret 1973 merupakan realisasi penyederhanaan sistem kepartaian yang ada, di mana sembilan partai

politik yang ada berfusi kedalam dua partai baru. Yaitu: empat partai Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) bergabung kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian lima partai lainnya, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Keberhasilan Presiden Soeharto dalam menciptakan format politik baru, telah memungkinkan berkembangnya kekuatan eksekutif yang kuat dan mantap, di sisi lain, hal ini juga didukung oleh suatu perubahan dalam situasi politik pada masa itu. Dimana pada tahun 1968-1971 telah terjadi perubahan dari suatu corak pemerintahan yang bersifat ketat ke corak pemerintahan yang lebih bebas, dan setelah format politik baru tersebut terbentuk dan mulai kokoh, sistem politik kemudian mulai bergerak ke arah ketat kembali.

1970 – 1971 : Munculnya Protes dan Ketidak Puasan

Pada tahun 1970 terjadi suatu perubahan yang menandai pra guncangan pada masa awal Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh maraknya kembali aksi dan protes mahasiswa. Ada beberapa alasan mahasiswa melakukan hal itu, pertama faktor-faktor objektif: jumlah mahasiswa bertambah terus akan tetapi budget pendidikan relatif berkurang, jumlah mahasiswa baru tidak sepadan dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia, meningkatnya inflasi dan bertambahnya kesulitan hidup. Semua itu menciptakan ketegangan. Ditambah lagi dengan adanya persepsi yang makin besar tentang merajalelanya korupsi di tahun 1970 yang mengiringi pertumbuhan ekonomi disamping munculnya tanda-tanda pertama

dari *boom* minyak. Sementara itu, pembangunan tidaklah dibarengi dengan perbaikan nyata tingkat hidup secara umum kecuali untuk suatu lapisan kecil masyarakat yang mulai menjadi penikmat.

Mahasiswa Indonesia, sebuah surat kabar mahasiswa di Bandung menulis dengan tegas bahwa tahun 1970 tersebut adalah “tahun ketidakpuasan” Bahkan Abar menuturkan didalam bukunya, bahwa pada masa-masa ini beberapa harian yang kritis juga secara langsung menuduh sejumlah perwira yang dekat dengan Presiden Soeharto terlibat korupsi, seperti Ibnu Soetowo, Sudjono Humardani dan Achmad Tirtosudiro.

Adapun agitasi-agitasi mahasiswa lahir karena naiknya harga minyak pada awal 1970-an. Dalam konteks ini para aktivis yang terdiri dari Victor D., Arief Budiman, Sjahrir dan Julius Usman melontarkan gerakan “Mahasiswa Menggugat” yang melancarkan aksi-aksi protes terhadap kenaikan harga minyak dan korupsi. KAPPI muncul kembali dan melakukan Aksi Pelajar 70. Para pelajar membagi-bagikan selebaran, menempelkan poster-poster dan menyebarkan masalah-masalah yang diutarakan para mahasiswa.

Gerakan-gerakan anti korupsi itu kemudian dihentikan ketika dibulan february secara resmi didirikan Komisi Empat Anti Korupsi dengan memberikan kesempatan bagi komisi yang dipimpin oleh Wilopo SH bersama bekas Wakil Presiden Hatta untuk bekerja. Sambil menunggu kesimpulan Komisi, aksi-aksi diarahkan pada soal-soal lain. Tanggal 19 Mei, IMADA, Gerakan Mahasiswa Jakarta dan Ikatan Mahasiswa Kebayoran melakukan demonstrasi di muka rumah kediaman Duta Besar A.S, Galbraith. Inilah demonstrasi anti A.S pertama sejak jatuhnya Soekarno. Maksud demonstrasi ini untuk mendukung gerakan antiperang Vietnam di A.S. Di bulan Juli, berbagai aksi protes terhadap aksi protes terhadap kondisi belajar yang kurang memenuhi syarat dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia (Jakarta), di Unpad (Bandung), dan di Yogyakarta serta di perguruan tinggi lain.

Gerakan Anti Korupsi dimulai lagi di bulan Juli karena Komisi Empat terlalu lambat mengumumkan hasil kerja mereka: Kelompok Mahasiswa Menggugat bergabung dengan KAPPI membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang dipimpin oleh Arief Budiman, Sjahir dan Marsillam Simandjuntak. Di Bandung, dengan tujuan yang sama, anggota-anggota Studi Grup di Bandung juga tidak mau ketinggalan membentuk Bandung Bergerak. Betapapun juga, gerakan yang dilakukan kedua kelompok ini mempunyai bentuk yang sama. Mereka mendatangi berbagai pejabat tinggi di berbagai Kementerian, meminta laporan mengenai korupsi dan penghambur-hamburan uang negara. Protes ini kemudian membuat Presiden Soeharto turun tangan untuk meredakan gerakan-gerakan yang ada, hal ini menimbulkan ironi dari *Mahasiswa Indonesia* yang kemudian menurunkan tajuk editorial sebagai berikut :

“Sedikitnya sejak dua generasi yang lalu, *alon-alon waton kelakon* mulai kurang populer. Orang-orang Jawa mulai meninggalkan hidup dalam perspektif keabadian dan membeli arloji. Waktu telah mulai menjadi pertimbangan. Seorang ahli musik mengeluh bahwa gending-gending Jawa Klasik mulai menghilang dan digantikan oleh gending dengan tempo yang lebih cepat Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan proses pengadilan dan dengan perbaikan-perbaikan organisasi Ia harus dimulai karena waktu di zaman Apollo lebih bengis dan lebih cekatan dari di

zaman Mahabharata. Sang Batara Kala di zaman sekarang telah menemukan pemeco internasional: *Now or Never.*”

Gerakan-gerakan di Jakarta dan Bandung makin seru. Kelompok Bandung Bergerak datang ke Jakarta. Mereka menempelkan poster-poster antikorupsi di kantor Pertamina dan Kejaksaan Agung. Kelompok itu diterima oleh DPR-GR dan Presiden Soeharto kepada mana mereka menyampaikan sepucuk surat terbuka mengenai masalah korupsi.

Dibulan September, Parlemen mengadakan diskusi membahas Rencana Undang-Undang Anti Korupsi. Gerakan antikorupsi dihentikan untuk sementara; para mahasiswa merasa bahwa tuntutan mereka telah didengar.

Tahun 1972 - 1973: Kembali ke Radikalisme

Tahun 1972 merupakan tahun dimana protes-protes mahasiswa kembali bermunculan. Perkara ini sendiri dimulai ketika Ibu Tien Soeharto mengusulkan mendirikan satu kompleks hiburan dan kebudayaan yang disebut Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Untuk melaksanakan proyek yang mahal ini, Ibu Tien mencari berbagai dana, terutama meminta kepada beberapa instansi resmi untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Hal ini dilakukan pada saat presiden baru saja giat meminta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mencurahkan seluruh usaha pada pembangunan. Inisiatif dari Ibu Negara ini segera saja dianggap tidak tepat sebab, selain bukan kebutuhan pokok, juga bertentangan dengan kepentingan negara karena biaya yang mahal dan tidak jelasnya cara memperoleh dana. Sebagai protes terhadap apa yang mereka anggap penghamburan yang tidak dapat diterima karena terbatasnya kemampuan

keuangan negara, maka para mahasiswa di Bandung dan Jakarta membuat berbagai gerakan ad-hoc dengan nama-nama lucu, seperti Gerakan Penyelamat Uang Rakyat, Gerakan Akal Sehat (GAS), dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat.

Tidak pelak hal ini menjadikan suhu politik menjadi meningkat, gerakan-gerakan anti “Mini” kemudian dilarang. Berbagai penanggungjawab seperti Arief Budiman, H.J Princen, ditangkap. Beberapa koran ditutup selama beberapa hari. Banyak wartawan mengalami tekanan. Persoalan ini dibawa ke DPR yang ditugaskan untuk mengambil keputusan tentang proyek ini. Setelah mendengarkan wakil – wakil dari empat buah koran *Ibukota (Sinar Harapan, Indonesia Raya, Berita Yudha, Harian KAMI, dan Mahasiswa Indonesia* dari Bandung) maka DPR menyimpulkan di bulan Maret 1972 bahwa proyek itu boleh diteruskan dengan syarat tidak boleh menikmati fasilitas keuangan dari negara dan juga tak ada sumbangan wajib.

Akan tetapi, aksi-aksi bukan mereda, malahan lebih hebat. Hal ini sendiri diakibatkan oleh berbagai fenomena yang muncul kemudian, seperti makin besarnya jurang antara yang kaya dan rakyat kecil. Ibnu Sutowo dalam hal ini, sang Raja Minyak, dan Direktur Pertamina kala itu menjadi contoh yang menarik untuk ditilik bagaimana Ia menjadi *trendsetter* dari gaya dan style orang kaya pada saat itu. *Mahasiswa Indonesia* kemudian membahas hal ini melalui tajuk rencananya sebagai berikut :

“.....Gajinya hanya 250 US per bulannya, namun ia hidup laksana putra raja dan seliweran di Jakarta dengan *Rolls Royce Silver Cloud* milik pribadinya.....”

Di sisi lain, hal ini kemudian ditambah dengan beberapa peristiwa yang

makin memperkuat ketidakpuasan mahasiswa dan berbagai kalangan intelektual kritis kala itu, yakni seperti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jakarta yang memakan biaya hingga Rp. 2 Milyar dan sambutan istimewa yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi kepada Dharma Wanita, dengan biaya yang dikatakan dapat dipakai untuk membangun sebuah rumah sakit. Hal ini kontras dengan kondisi orang-orang kecil yang makin terhimpit karena harga-harga yang semakin melambung pada semester kedua pada tahun 1973 disamping dibuatnya berbagai peraturan baru yang mempersulit gerak dari perekonomian mereka, seperti dalam contoh larangan berniaga oleh pedagang kaki lima dipusat-pusat kota.

Dari Kerusuhan, Petisi hingga Demonstrasi : Menuju Malari 1974

Dalam suasana politik yang semakin menegang, pecah suatu kerusuhan anti Cina di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973. Berawal dari pemukulan seorang pribumi oleh orang Cina, hal ini kemudian memicu sekelompok pemuda pribumi, terutama anak-anak muda menyerang penduduk Tionghoa, melempari kaca etalase toko dan rumah milik penduduk Tionghoa serta merusak dan membakar kendaraan bermotor serta pabrik-pabrik milik penduduk Tionghoa. Akibat kerusuhan ini, 1 orang meninggal, 50 orang luka-luka, banyak rumah yang diobrak-abrik, 300 buah kendaraan hancur, sebuah gereja dan 3 pabrik tekstil rusak. Oleh sejumlah media kala itu, peristiwa ini dihubungkan dengan masalah kesenjangan ekonomi antara penduduk pribumi dan nonpribumi yang amat lebar dan sikap pemerintah yang dikatakan acuh tak acuh terhadap hal ini. Hal ini kemudian menjadi peristiwa pendahulu dari sebuah proses yang akan menuju kepada klimaksnya, yakni peristiwa Malari 1974.

Seiring dengan ketidakpuasan yang semakin meluas dan kritik pers yang semakin tajam terhadap politik pembangunan yang ada

kala itu, muncul sebuah diskusi di UI pada tanggal 13 – 16 Agustus 1973 yang bertepatan “28 Tahun Kemerdekaan Indonesia”, dengan pembicaranya adalah Soebadio Sastroatomo, Sjafruddin Prawiranegara, Ali Sostroamidjojo, dan T.B Simatupang. Diskusi ini sendiri menyimpulkan hal penting, yakni “perlunya serangkaian tindakan untuk menyelesaikan masalah dan bukan sekedar diskusi-diskusi”.

Hal ini kemudian mendapatkan momentum ketika pada tanggal 24 Oktober 1973, sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) dengan pimpinannya Hariman Siregar, seorang mahasiswa Kedokteran menyampaikan sebuah petisi yang dialamatkan kepada pemerintah, militer, para teknokrat, kaum politisi serta kaum cendekiawan. Petisi itu sendiri pada sebuah upacara simbolis di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dalam rangka berziarah untuk menghormati para arwah pahlawan yang dimakamkan disana. Penyampaian petisi ini diiringi dengan pembacaan sajak-sajak protes serta nyanyian-nyanyian yang bernada protes. Petisi mahasiswa 24 oktober ini antara lain berbunyi sebagai berikut :

Mengingat kepada pemerintah, militer, intelektual, teknokrat politisi hal-hal sebagai berikut :

1. Meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun suatu strategi yang didalamnya terdapat keseimbangan dibidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
2. Segera bebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastian dan

- pemeriksaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran.
3. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi serta pendapat masyarakat harus mendapat kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya.
4. Yang paling berkepentingan masa depan adalah kami. Oleh karena itu penentuan masa depan yang tak terlepas dari keadaan kini adalah juga hak dan kewajiban kami.

Petisi ini kemudian menjadi arah baru bagi protes dan demonstrasi-demonstrasi jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa, hal ini juga menjadi dukungan bagi kritik pers dan masyarakat terhadap politik pembangunan yang ada selama ini. Judilherry Justam, tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UI kala itu yang juga merupakan Sekretaris Jendral dari Ketua DMUI mengatakan bahwa suasana atau *zeitgeist* ketidakpuasan yang meluas pada saat itu, terutama pada modal asing dan jurang yang semakin melebar antara si kaya dan miskin, yang pada akhirnya memantik mahasiswa untuk bergerak, berikut potongan wawancara yang dikutip sebagai berikut :

“Petisi 24 oktober itu ya sebagai kesimpulan dari diskusi beberapa tokoh-tokoh dari DMUI pada waktu itu. Intinya petisi itu adalah kita prihatin dengan kebijakan pembangunan yang, terutama pembangunan ekonomi ya, yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, yang lebih

mengandalkan diri pada modal asing, yang akibatnya tidak terlalu memperhatikan masalah keadilan, jadi petisi itu ya kita menolak strategi pembangunan yang tidak berpihak terhadap upaya kita memberantas kemiskinan, upaya kita untuk memberantas ketidakadilan, Kenapa? Karena kami menilai bahwa masa depan ini adalah masa depan pemuda pada waktu itu.”

Mahasiswa, pada saat itu yang merupakan wakil dari para generasi muda pada akhirnya tampil sebagai *moral force* terhadap keadaan yang dikatakan tidak sesuai dengan jalan kemakmuran rakyat yang didengungkan oleh mereka kala menumbangkan Orde Lama dan membidani Orde Baru kala itu. Mereka tidak percaya terhadap janji bahwa kemakmuran akan menetes kebawah dan dirasakan oleh kalangan rakyat banyak (*Trickle Down Effect*), pada akhirnya petisi “24 Oktober” yang dicetuskan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada 1973 menjadi momentum untuk meminta agar strategi pembangunan yang ada ditinjau kembali. Setelah petisi tersebut, mahasiswa-mahasiswa di kota-kota lain mengeluarkan pula pernyataan yang senada dengan apa yang ada di Jakarta. Pernyataan ini sendiri adalah reaksi spontan pemuda menghadapi pihak yang berkuasa. Hal ini berjalan serentetan dengan aksi-aksi pemuda Islam di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera untuk menentang RUU Perkawinan, mahasiswa di Bandung dan Surabaya, terutama ITS dan ITB melancarkan pula aksi protes terhadap kampanye anti rambut gondrong.

Pada bulan Oktober yang sama, di Bandung, sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi protes terhadap politik

pembangunan yang berorientasi kepada GNP. Mereka membawa poster-poster yang antara lain berbunyi: “*GNP Naik, Celana Rakyat Melorot*”, dan “*Seribu Ten Ditanam, Seribu Majalaya Bangkrut*”. Di bulan Nopember 1973, aksi-aksi protes mahasiswa di berbagai kota makin meningkat, dua peristiwa besar yang melatarbelakangi dan juga memperbesar alur dari protes dari mahasiswa itu sendiri disatu pihak adalah penggulingan Marsekal Thanom Kittikachorn di bulan Oktober 1973 oleh mahasiswa Thailand. Peristiwa ini sendiri menjadi lecutan bagi para mahasiswa di Indonesia untuk dapat membuat gerakan yang sama seperti yang ada dinegara gajah putih tersebut, Disisi lain, hal kedua yang menjadi unsur penting dalam hal ini adalah kedatangan Ketua IGGI sekaligus Menteri Kerjasama Pembangunan negeri Belanda, J.P Pronk ke Indonesia yang akan melakukan kunjungannya selama beberapa hari. Kedatangan Pronk tersebut tak pelak disambut dengan sikap anti modal asing dari mahasiswa. Di Jakarta, sejumlah mahasiswa UI yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Indonesia (GMII) menyambut kedatangan J.P Pronk, mereka membawa poster-poster protes yang antara lain berbunyi: “*Dengan Modal Asing telah berpulang Modal Pribumi, Investasi Asing melahirkan kolonialisme Intern, Aduh Mak Sayang, Hatiku Hilang, Minyak Bumiku Disedot Orang*”, dan lain-lainnya. Mereka juga menyampaikan sebuah memorandum yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Diri kami tidaklah dapat lagi berbangga atas hasil-hasil bantuan luar negeri dan modal asing, apabila itu berarti lebih banyak gedung-gedung dan hotel-hotel menjulang tinggi, industri-industri kecil, mobil toyota, ataupun Coca Cola, night club, dan lain-lain, sementara itu, bertambah

banyak rakyat yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah dan kehilangan tanah, matinya industri kecil tekstil kami, gundulnya hutan-hutan serta keringnya ladang minyak kami. Bahkan lebih dari itu: terlantarnya dunia pendidikan serta masa depan generasi muda kami”.

Hal ini tak pelak menimbulkan kericuhan kecil didalam bandara karena polisi anti huru-hara yang didatangkan dengan sebuah Jip dengan sigap merebut poster-poster dan memorandum yang sedang dibagi-bagikan tersebut. Dorong-mendorong pun terjadi antara polisi dan mahasiswa. Penyambut dari pemerintah dalam hal ini adalah Prof. Widjojo, Menteri Urusan Pembangunan, yang *notabene* bersama dengan teknokrat-teknokrat lainnya, merupakan tokoh-tokoh dari UI sendiri, yang kini menjadi sasaran dari para aktivis mahasiswanya.

Di Yogyakarta, sekitar 50 orang mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (GEMIRI) memasang beberapa spanduk untuk menyambur kedatangan J.P Pronk ke Yogyakarta. Menurut pernyataan mereka, bahwa mereka menolak segala bentuk bantuan luar negeri, selama bantuan itu hanya memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Sejalan dengan protes-protes yang didengungkan, aksi-aksi protes mahasiswa diberbagai kota terus berlangsung dan semakin meningkat. Aksi-aksi itu, selain untuk mengkritik politik pembangunan yang dipilih oleh Orde Baru dan berbagai kebijakan ekonomi “pilih kasih”-nya yang lebih menguntungkan golongan non-pribumi daripada golongan pribumi, juga ditujukan untuk mengkritik para Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, dalam hal ini adalah Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani yang tingkah laku

politik-ekonominya dinilai menjerumuskan perekonomian Indonesia kedalam lembah utang dan ketergantungan kepada Jepang.

Sementara kritik dan aksi mahasiswa terus berjalan, sejumlah cendekiawan dan intelektual pun tidak ketinggalan dalam mengemukakan kritiknya terhadap arah dan politik pembangunan yang dipilih oleh Orde Baru, seperti dosen ekonomi yang juga merupakan rekan dari Prof. Widjojo di Universitas Indonesia, Prof, Dorodjatun Kuntjoro Djakti yang mempertanyakan arah dari strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh koleganya tersebut.

Jenderal A.H Nasution sendiri pernah menyoal bagaimana kekesalan Bung Hatta sang proklamator kemerdekaan yang juga merupakan tokoh perekonomian koperasi di Indonesia, terhadap kondisi yang sedang melingkupi negerinya yang dikatakan tercengkeram oleh Modal Asing, berikut kutipan perkataannya antara lain sebagai berikut :

“ Dalam keprihatinan ekonomi tadi saya dengar satu anekdot historis dari Brigjen Sadikin, Panglima Siliwangi. Bung Hatta pernah menyatakan kekesalan terhadap keadaan, lalu Sadikin berkata, “Salah Bung Hatta sendiri.” Sang Proklamator itu jadi merah muka. Lantas beliau ikut tertawa juga setelah Sadikin menambahkan, “Bukankah Bung Hatta yang memprakarsai ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga pejabat ini membangun ekonomi keluarganya!”

Ujung tahun 1973 ditandai oleh adanya gerakan-gerakan dari mahasiswa di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Seratus wakil Dewan Mahasiswa mencoba menemui Soeharto di

Istana Negara untuk menyampaikan tuntutan mereka. Akan tetapi hal ini tidak berhasil, karena Presiden tidak berada ditempat. Mereka kemudian mencoba menemui Sekretaris Negara, Sudharmono yang kebetulan juga tak ada ditempat. Para Mahasiswa tersebut kemudian mengarahkan aksinya menuju rumah Presiden di Jl. Cendana. Soeharto pun tidak ada disana, akibatnya “dialog langsung” itu gagal untuk dilakukan.

ASPRI, yang tak luput menjadi sasaran mahasiswa kala itu, mulai melancarkan serangan balasan. Mereka mencoba memanipulasi keresahan di kampus-kampus demi kepentingan mereka. Setelah mengadakan pertemuan bersama, sebelas mahasiswa anggota Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan sebuah mosi tidak percaya terhadap Hariman Siregar, ketua DMUI kala itu. Tokoh ini dianggap mengkhianati cita-cita Oktober 1965, dan dituduh telah “dimanipulasi oleh partai-partai”. Pada saat yang sama berbagai selebaran yang menyerang Hariman Siregar beredar di kampus UI. Intrik-intrik ini kemudian berhasil dipatahkan ketika Dewan Mahasiswa bersidang dan memutuskan untuk memecat para penentang Hariman Siregar. Dengan ini, wakil-wakil mahasiswa menunjukkan kembali kepercayaan mereka meskipun ada ancaman terselubung terhadap Dewan yang asalnya harus dicari di kalangan ASPRI.

Malam tirakatan pada akhir tahun 1973 di kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, menjadi momentum penting, acara yang diadakan menjelang tahun baru yang dihadiri mahasiswa dan dosen UI serta perwakilan dari berbagai dewan mahasiswa dari Jakarta, Bogor, dan Bandung itu dilakukan dengan khidmat, dan pada akhirnya mengeluarkan pernyataan secara terbuka untuk menentang modal asing dari Jepang. Mereka pun sepakat untuk menolak rencana kunjungan Perdana Menteri Kakuei Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 – 17 Januari 1974,

yang dimana Tanaka kala itu direncanakan bertemu dengan Presiden Soeharto guna membahas kerjasama bilateral.

Ketua DMUI kala itu, Hariman Siregar juga membacakan “Pidato Pernyataan Diri Mahasiswa” pada malam tirakatan tersebut yang didalamnya berisi kritik terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan Soeharto. Mahasiswa menilai strategi pembangunan ekonomi hanya menguntungkan segelintir elite. Rakyat kecil justru makin sengsara. Pemerintah dianggap terlalu mengandalkan suntikan modal asing, khususnya dari Jepang, untuk menggerakkan roda ekonomi. Pada akhirnya Hariman mengajak seluruh elemen dan mahasiswa untuk bergerak, guna menjadi *moral force* bagi kepentingan dan hakikat kemanusiaan yang dikatakannya mulai terenggut kala itu. Hal ini jelas terekam dalam kutipannya sebagai berikut:

“Mari kita baca beban sejarah yang ada di depan kita. Beban kita adalah membebaskan rakyat dari penderitaan hidup sehari-hari. Ringkasnya, beban sejarah kita adalah menggalakkan keberanian rakyat untuk menyuarakan diri Sekali kita mengelak, untuk selamanya kita akan menjadi warganegara yang dikutuk sejarah. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah menghentikan kebisuan yang ditimbulkan oleh himbuan kenikmatan yang dijanji-janjikan kepada kita. Dan juga kebisuan akibat feodalisme yang mementingkan sikap nrimo, apatis dan antipartisipasi”

Seruan dari halaman depan kampus UI dipenghujung tahun itu rupanya memicu munculnya berbagai demonstrasi. Mahasiswa kemudian mendeklarasikan “Tritura Baru” pada 10 Januari. Bertempat di terminal bus Lapangan Banteng, mahasiswa, yang

menamakan dirinya sebagai Badan Kerja Sama (BKS) IKIP tersebut mencetuskan “Tritura Baru tahun 1974”. Tritura baru ini sendiri antara lain berisi: 1. Bubarkan ASPRI, 2. Turunkan harga, 3. Berantas korupsi. Apel besar menyambut “8 tahun tritura” pada siang hari itu dilakukan ditengah-tengah keramaian terminal bus lapangan Banteng. Disaksikan ratusan pelajar dan mahasiswa beserta orang ramai di terminal tersebut, diproklamkanlah “Tritura Baru tahun 1974.”

Tidak lama setelah membacakan teks “Tritura Baru” tersebut, Muslimin, Ketua Dema IKIP langsung diangkut oleh polisi dengan Jip yang telah tersedia. Di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta, mahasiswa membakar patung keras Tanaka serta asisten pribadi Presiden, Soedjono Hoemardani, Ali Moertopo, dan Widodo Budidarmo. Aksi itu merupakan simbol penolakan terhadap Jepang dan para ASPRI Presiden Soeharto. Unjuk rasa makin menjalar ke Bogor, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar. Aksi-aksi tersebut kian meningkat seiring jelang kunjungan Perdana Menteri Tanaka ke Indonesia. Pembakaran patung kertas Tanaka dan Soedjono menjadi semakin marak. Buntutnya, pada 11 Januari 1974, Presiden Soeharto menerima wakil-wakil dari 35 perguruan tinggi se-Indonesia kala itu DI Binagraha untuk berdialog, guna mencurahkan segala isi hati mereka yang diharapkan akan mengurangi gerakan mahasiswa yang ada. Namun yang terjadi malahan sebaliknya, sehari setelah bertemu dengan Presiden, mahasiswa kembali berdemonstrasi. Boneka-boneka yang bergambar Tanaka dan Soedjono pun kembali dibakar. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa tidak puas dengan pertemuan yang ada, yang dikatakannya hanya berlangsung selama dua jam dan menurut mereka, “jawaban-jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan.” Jenderal A.H Nasution dalam bukunya merekam peristiwa dialog yang berlangsung

ini secara apik dengan menjelaskannya sebagai berikut :

“...Sementara Presiden berdialog dengan Dema-Dema, mahasiswa lainnya mengumandangkan nyanyian-nyanyian diruangan pers, antara lain dengan syair: “Di sini Jepang, di sana Jepang, dimanamana modal Jepang.” Dilakukan dengan gaya lagu “Cangkul yang dalam”, yang berbunyi variasi “Cangkul-cangkul yang dalam, cukong yang subur wajib dikubur”. Juga dinyanyikan lagu naik gunung yang diubah menjadi “Naik-naik si harga minyak, tinggi-tinggi sekali. Tiap tahun harganya naik untuk ratu melulu; kiri-kanan kulihat saja, gubuk-gubuk melulu...”

Hal ini kemudian makin mengeraskan tekad mahasiswa untuk melakukan demonstrasi guna menyambut kedatangan Perdana Menteri Tanaka di Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, yang kemudian, hal tersebut akan berujung pada kerusuhan bersejarah ditanggal 15 Januari, yang hanya berselang empat hari, setelah pertemuan antara mahasiswa dan Presiden dilakukan.

Malari 1974: Klimaks sebuah Peristiwa

Tanggal 12 Januari, ketua DMUI, Hariman Siregar menyatakan bahwa akan diadakan gerakan menyambut Tanaka untuk memberitahukan bahwa rakyat Indonesia masih punya kebanggaan nasional dan masih banyak orang yang tidak dapat dibeli dengan harta. Pernyataan ini kemudian merupakan fase pembuka daripada gerakan demonstrasi

mahasiswa dalam menyambur PM Tanaka pada tanggal 14 Januari.

Hal ini kemudian direalisasikan dengan demonstrasi besar-besaran pada tanggal yang ditentukan, sebagai protes terhadap kedatangan PM Jepang di lapangan terbang Halim Perdanakusuma, walaupun tidak berhasil menerobos masuk karena petugas-petugas keamanan dengan sigap menghadang para demonstran dengan senjata yang terhunus. Para mahasiswa, dalam hal ini juga tidak lagi memperdulikan peringatan-peringatan dari Laksana Sudomo dan Menteri Pertahanan M. Panggabean yang mulai menyinggung gerakan mahasiswa “sebagai sesuatu yang tidak murni dan menjurus ke makar.”

Aksi – aksi mahasiswa yang selama ini menjadi kekuatan moral untuk melakukan kontrol dan kritik, terus merengsek dan bergerak, apalagi setelah “kontak” antara mahasiswa demonstran dan PM Jepang tersebut tidak dapat terjadi akibat pengawalan yang berlapis dari aparat keamanan. Alhasil, hal ini makin menaikkan suhu yang sudah terjadi kala itu.

Pada malam harinya, bertempat di *Student Centre* Universitas Indonesia, para puluhan perwakilan Dewan Mahasiswa (Dema) dari perguruan tinggi se-Jawa, yang dipimpin Dewan Mahasiswa UI menggelar rapat untuk mengevaluasi demonstrasi menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat persiapan ini sendiri dipimpin oleh Gurmilang Kartasmita, wakil ketua DMUI yang juga sahabat dari Hariman Siregar. Dua tema yang dibicarakan adalah rencana dialog dengan Tanaka dan menentukan rute unjuk rasa. Setelah bersepakat, rapat pada akhirnya ditutup setengah jam setelah lewat pergantian hari. Sebagian massa tidur dikampus UI sebagai basis gerakan, sedangkan sisanya memilih kembali kerumah untuk kemudian

bersama-sama paginya melakukan aksi demonstrasi.

Pada Selasa paginya, bertanggal 15 Januari 1974, demonstran yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis nonkampus berkumpul di Sekretariat Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI), Jalan Salemba, Jakarta Pusat, guna melangsungkan aksi. Para massa aksi sendiri kala itu bersepakat acara kemudian dipusatkan ke Universitas Trisakti. Dengan membawa tema sentral dengan tiga tuntutan, yakni bubarkan Aspri, turunkan harga-harga, dan berantas korupsi yang kemudian dikenal “Tritura 1974”, mereka mulai berjalan kaki dari Salemba sekitar jam 08.00 menuju Jalan Raden Saleh, lalu ke Cikini, Gambir, dan Merdeka Timur. Setelahnya massa aksi kemudian terus bergerak mampir ke Monumen Nasional, dalam perjalanan, jumlah demonstran bertambah, terutama karena ikutnya para pelajar SMA. Sepanjang perjalanan para demonstran menurunkan bendera-bendera penambutan tamu negara menjadi setengah tiang sebagai tanda duka cita karena datangnya Tanaka.

Setelah apel dibubarkan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tak dianya setelahnya, “unsur-unsur tidak terkontrol” diluar massa mahasiswa, dimana ratusan dan ribuan massa, yang diantara berisi para preman, perusuh, dan pencuri kemudian mulai membuat kerusuhan dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji: mereka membakari mobil-mobil Jepang, mengempeskan ban, sambil mengobrak-abrik toko-toko, gedung-gedung dan lainnya. Ketua DMUI, Hariman Siregar sendiri yang mengetahui hal itu setelah apel mahasiswa berusaha untuk mengendalikan massa yang begitu tak terkendali kala itu, akan tetapi tidak berhasil. Berikut petikan wawancaranya yang dikutip antara lain sebagai berikut:

Jadi gua sendiri waktu itu bilang ke masyarakat minta

kebijakan, boleh nyanyi dulu.. maju tak gentar dulu... ga ada yang bisa nyanyi, nah dalam hati gw nih, wah ini kaco juga sedikit nih gua pikir... Seriussss.. “perjuangan kita tidak untuk untuk pengrusakan”, “pulang dulu nanti kita kumpul lagi”....

Melalui wadah *Tempo*, Abar berusaha mengupas bagaimana peristiwa yang lebih kita kenal dengan peristiwa “ Malapetaka Limabelas Januari ” ini berlangsung:

“Dari segi kelumpuhan yang ditimbulkannya terhadap kehidupan ibukota, orang agaknya bisa membandingkannya dengan lumpuhnya kota Paris akibat huru-hara disana pada bulan Mei 1968. Dan ketegangan yang dirasakan penduduk Jakarta minggu lalu, tak ubahnya ketegangan yang dialami oleh penduduk Peking ketika huru-hara yang pecah di Universitas Peking di masa puncak revolusi kebudayaan disana. Untuk pertama kalinya memiliki barang-barang buatan Jepang, terutama kendaraan bermotor, bagi orang Jakarta minggu lalu merupakan beban pikiran yang menyiksa dan semacam dosa.”

Kerusuhan massa berlangsung terus sampai dengan keesokan harinya walaupun berbagai organisasi sudah menyerukan supaya tenang. Akhirnya pada tanggal 16 malam, ketua DMUI Hariman Siregar menyerahkan diri kepihak yang berwajib, dan kemudian menampilkan diri di layar televisi untuk menenangkan para demonstran. Dia

membacakan sebuah deklarasi dari Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang kekerasan yang terjadi.

Menurut hasil sementara perhitungan *Mahasiswa Indonesia* akibat dari kerusuhan yang berlangsung tersebut, sedikitnya: 9 orang meninggal, 23 luka-luka dan seluruh Pusat Perdagangan Senen, dan banyak kendaraan (terutama kendaraan buatan Jepang) dibakar, berbagai bangunan baik milik Jepang maupun bukan juga rusak berat. Sedangkan Abar sendiri, mengutip dari Jenderal M Panggabean mengatakan bahwa sebanyak 807 mobil dan 187 motor rusak dan hancur, 144 gedung rusak atau terbakar dan 160 kilogram emas hilang, korban manusia sebanyak 11 orang meninggal, 17 orang luka berat dan 120 orang luka ringan.

Di sisi lain, Marzuki Arifin mengkalkulasikan bahwa setidaknya 11 orang meninggal, luka-luka 137 orang, 993 kendaraan dibakar/dirusak, 144 gedung dibakar dan dirusak, termasuk juga didalamnya gedung Coca-cola dan Pertamina.

Titik kulminasi dari situasi politik yang berkecamuk tersebut pada akhirnya adalah penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan individu yang dianggap mempunyai peranan dalam kerusuhan tersebut. Kurang lebih menurut Raillon ada sekitar 700 orang yang ditangkap dengan 45 orang yang terus ditahan, dengan pembagian kategori atas empat kelompok, yakni yang pertama adalah kelompok mahasiswa dengan tokoh utamanya Hariman Siregar, para bekas pemimpin PSI, seperti Soebadio Sastrosatomo dan Profesor Sarbini Sumawinata, mereka yang dekat dengan PSI, seperti diantaranya dikatakan adalah Pengacara Adnan Buyung Nasution, dosen di UI, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan Ketua Liga hak-hak Azasi Manusia, H. Princen, Rahman Tolleng serta aktivis-aktivis muda Islam. Di sisi lain, kebijakan ini disertai pula dengan serangkaian tindakan pemerintah

dalam melarang terbit beberapa harian ibu kota secara massal dan beruntun pada awal tahun 1974. Oleh kebanyakan personel persuratkabaran, peristiwa itu dianggap sebagai masa kelabu bagi pers Indonesia.

Pada masa tersebut terdapat sekitar 12 media cetak yang dibredel, seperti: *Nusantara, Indonesia Raya, Pedomannya, Kami, Mahasiswa Indonesia, The Jakarta Times, Abadi, Suluh Berita, Pemuda Indonesia, Indonesia Pos*, mingguan *Wenang* dan majalah *Ekspress*. Pemerintah menuduh pers ikut bertanggung jawab atas peristiwa malari. Pers dianggap turut serta dalam mematangkan situasi politik yang kemudian meledak menjadi aksi huru-hara yang menelan korban jiwa dan materi.

Pemerintah menganggap pers kurang memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap stabilitas nasional. Sehingga setelah peristiwa malari, pemerintah mengambil langkah-langkah penertiban atas pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh pers, antara lain menertibkan pemberitaan-pemberitaan dalam pers nasional atau bisa disingkat dengan nama pembredelan.

Analisis Malari: Dari Rambut Gondrong sampai Duel Para Jendral

Peristiwa 15 Januari, atau yang kemudian dikenal dengan peristiwa malari ini sendiri menurut beberapa peneliti disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa tersebut. Diantaranya pendapat dari Marzuki Arifin, mantan pemimpin redaksi *Express* yang dekat dengan Ali Murtopo berpendapat bahwa akar-akar dari peristiwa malari sudah dimulai semenjak bulan September dan Oktober 1973 karena pada masa itu sorotan pers terhadap penanaman modal asing Jepang yang dianggap akan merugikan Indonesia sudah mulai muncul. Faktor kontroversial “rambut gondrong”, juga dianggap turut andil terhadap akar-akar peristiwa malari.

Sedangkan menurut Francois Raillon, peristiwa kerusuhan Bandung pada tanggal 5

Januari 1974 menjadi akar daripada peristiwa malari. Selain itu, untuk memahami peristiwa malari kita juga harus melihat kembali pada pertentangan pengaruh dari para Jendral yang berlangsung di sekitar presiden sejak tahun 1972. Kelompok pertama terdiri dari tokoh-tokoh sipil di kekuasaan, terutama para teknokrat yang duduk di pemerintahan dan Bappenas. Mereka membuka diri pada dunia Barat, Bank Dunia dan IGGI, dan lebih condong pada pembangunan model Amerika dan liberal.

Orang-orang yang berada dikelompok ini antara lain ialah Jenderal Soemitro, Pangkopkamtib dan Jenderal Sutopo Yuwono, Kepala Bakin. Di antara mereka ini juga terdapat tokoh-tokoh Orde Baru yang tersingkirkan secara bertahap, seperti Jenderal Nasution dan Jenderal Sarwo Edhie. Beberapa anggota Dewan Mahasiswa juga diisukan bersimpati terhadap kelompok ini, salah satunya ialah ketua DMUI, Hariman Siregar. Sedangkan dikelompok lainnya ialah Ali Murtopo, Sudjono Humardhani dan beberapa Aspri yang telah menjadi sasaran mahasiswa.

Beberapa tokoh angkatan '66 dulu, seperti David Napitupulu, Lim Bian Kie dan Cosmas Batubara mendukung mereka. Mereka setuju dengan pembangunan sektor swasta melalui simbiosis dengan negara seperti model ekonomi Jepang; dan memilih kapitalisme birokratis model Pertamina. Alasan kedua kelompok yang masing-masing dipegang oleh Soemitro dan Ali Murtopo ini bertentangan ialah karena perbedaan tafsiran tentang teori ekonomi yang musti dipakai.

Dalam beberapa segi hal ini tentunya berhubungan, karena jika kita tilik lagi kepada kondisi ekonomi pada awal masa pemerintahan orde baru, Indonesia berada pada keadaan yang sangat buruk. Zaman orde lama yang sangat fokus pada manifesto politiknya meninggalkan banyak masalah ekonomi pada masa awal orde baru, akibatnya terjadi inflasi besar-besaran, hutang yang menumpuk dimana-mana dan banyak masalah

lainnya. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden akhirnya membuat sebuah badan pembangunan nasional yang terdiri dari ekonom-ekonom anak buah soemitro djojohadikusumo.

Tim ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan ‘Mafia Berkeley’ karena hampir seluruh anggotanya merupakan lulusan University of California, Berkeley ini merupakan teknokrat yang menentukan seluruh kebijakan ekonomi dan anggaran negara pada masa itu. Di sisi lain, Ali Moertopo juga memiliki sebuah lembaga studi yang didirikan bersama Pater Beek untuk menjadi dapur pemikiran bagi pemerintah untuk mengkonsep sistem dan kebijakan negara selanjutnya yaitu CSIS.

Lembaga ini didukung oleh ilmuwan-ilmuwan lulusan eropa seperti Pang Lay Kim, Daoed Joesoef, Soedjati, Harry Silalahi, dan Hadisoastro. Dari kedua kubu inilah (CSIS dan Teknokrat) kebijakan politik dan ekonomi nasional diambil. Ironisnya, dari kedua kubu ini pula muncul pertentangan. Pertentangan-pertentangan ini seringkali muncul karena kebijakan masing-masing kubu yang bertolakbelakang satu sama lain, walaupun pada saat itu Presiden Soeharto berusaha untuk menggabungkan kedua lembaga tersebut dalam usahanya untuk membangun Indonesia.

Sedangkan dalam tafsiran yang lainnya mengenai hal ini, meskipun tidak bertentangan dengan tesis bahwa malari adalah akibat dari kontradiksi antara kedua kelompok, tesis ini menjelaskan bahwa konflik yang terselubung dalam malari adalah karena adanya konflik generasi yang sedang berlangsung dikalangan militer. Sebuah generasi baru yang lebih profesional dan dididik dalam berbagai akademi militer, pada tahun 1970-an mengancam apa yang dilakukan oleh Aspri. Mereka menghendaki dilakukannya reformasi untuk menegakkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih kuat,

lebih rasional dan efisien. Para perwira muda ini kemudian lebih memilih Jenderal Soemitro karena dijanjikan adanya prospek dan karir yang lebih cepat.

Hariman Siregar sendiri berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan antiklimaks dari persekutuan antara kampus dan militer yang begitu hangat pada masa-masa sebelumnya, yakni pada tahun 1966 yang dimana kampus, dalam hal ini diwakili oleh para mahasiswa bersama dengan militer kala itu bersama-sama untuk menjatuhkan rezim Orde Lama yang sedang berkuasa kala itu. Akan tetapi itu semua tidak berlangsung lama, karena persekutuan itu kemudian retak ketika mahasiswa sebagai *moral force* menemukan nalar kritisnya kembali dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru yang kala itu dikatakannya sudah melenceng dari amanat penderitaan rakyat yang sebenarnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan peristiwa Malari merupakan sarana yang tepat guna menyingkirkan “lawan-lawan” yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaannya tersebut. Berikut petikan wawancara penulis dan Hariman yang dikutip sebagai berikut :

“..... Orde Baru kan selalu mengklaim kalau mereka itu didukung oleh kampus untuk melawan PKI waktu itu, melawan soekarno waktu itu, karena kan yang menentang dia kampus gitu loh, yang notabenenya ngangkat dia. Mungkin dia kepepet-pepet terus, jadi memang waktu huru – hara itulah kesempatan dia untuk menghantam dia, nangkep ga lo? Disitulah ditangkep kita, bukan hanya kita, sekaligus lawan-lawan dia... buyung ditangkep, pak sarbini, subadio.. yang dianggap sama dia dibelakang itu semua ditangkep gitu loh, ada islam-islam juga kan, ada segala

macam lah elemen-elemen yang dianggap sama mereka, sekaligus juga pembersihan kedalem oleh dia, jadi jendral-jendral yang dianggap sama dia akan bisa menantang juga dibabat juga ... “

Alhasil, apapun yang terjadi hal ini kemudian pada akhirnya menyebabkan awal dari sebuah indikator kembalinya pergeseran situasi politik di Indonesia pada masa Orde Baru, dari yang tadinya bersifat longgar menjadi ketat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL DAN WAWANCARA LISAN :

Wawancara Lisan dengan Hariman Siregar, Tokoh Malari dan Ketua DMUI Periode 1973 – 1974, dirumahnya tanggal 7 Mei 2015

Wawancara Lisan dengan Judiherry Justam, Tokoh Malari, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Indonesia Tahun 1974 dan Sekjend DMUI Periode 1973-1974, dikantornya tanggal 17 April 2015.

Alfian. “Format Politik Indonesia,” dalam *Indonesia Magazine* no. 24. Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 1974.

Feith, Herbert. “Soeharto Search for a Political Format”, *Indonesia*. No. 6 (Oct 1968), South East Asia Program Publication of Cornell University. di unduh dari www.jstor.org/stable/3350713 tanggal 16/04/2015 Jam 22:59

Hindley, Donald. “Indonesia 1971: Pantjasila Democracy and the Second Parliamentary Elections”, *Asian Survey*, Vol. 12, No. 1, A Survey of Asia in 1971: Part I (Jan., 1972). University of California Press. di unduh dari <http://www.jstor.org/stable/2642920> tanggal 17/04/2015 Jam 11:36

BUKU :

Abar, Akhmad Zaini. 1966-1974 : Kisah Pers Indonesia. Yogyakarta : Lkis, 1995.

Agustina, Widiarsi. *Masalah Misterius Malari : Rusuh Politik Pertama Dalam Sejarah Orde Baru*, Jakarta : Tempo Publishing, 2014.

Arifin, Marzuki. *Fakta Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia. 1974.

Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila*. Dalam kumpulan karangan. Jakarta: PT. Gramedia. 1994.

Cahyono, Heru. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1998.

Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1986.

Hasibuan, Imran. *Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa menentang Modal Asing*. Jakarta : Q Communication, 2011.

Mallarangeng, Rizal. *Mendobrak Sentralisme Indonesia 1986-1992*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2004.

Nasution, A.H. *Mengawal Nurani Bangsa, Jilid III : Bersama Mahasiswa “Aset Utama Pejuang Nurani”*, Jakarta : Yayasan Kasih Adik bekerjasama dengan DISBINTALAD, 2008.

Raillon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Said, Tribuana (Peny). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: C.V Masagung, 1980.

Siregar, Amir Efendi. *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti*. Jakarta: PT Karya Unipress, 1983.

Siregar, Hariman. *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Jakarta : Mantika Media Utama, 1994.

Tidar, Herald (Peny). *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi: Perkembangan Permasalahan dan Perspektifnya*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.